ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.10, September 2026

# Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat : Studi Kasus Goa Lawah Lombok Barat

**Nusi Usmanda[1], Dwiyono Rudi Susanto[2], Amin Kiswantoro[3]**
[1]Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia
E-mail: usmandanusi@gmail.com[1], rudyderudi@gmail.com[2], aminkiswantoro@gmail.com[3]

**Article History:**
Received: 23 Juli 2026
Revised: 29 Agustus 2026
Accepted: 05 September 2026

**Keywords:** *Analisis Pemangku Kepentingan, Ekowisata Berbasis Masyarakat, Tata Kelola Kolaboratif, Goa Lawah, Lombok Barat.*

***Abstrak:*** *Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh yang berbeda, sehingga pemetaan yang akurat menjadi prasyarat penting untuk menghindari konflik dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, kepentingan, dan potensi konflik antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata Goa Lawah di Desa Wisata Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik stakeholder analysis (identifikasi aktor, matriks pengaruh-kepentingan) yang didukung observasi lapangan, wawancara dengan pengelola dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian mengidentifikasi sembilan kategori aktor utama, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal termasuk Kelompok Wanita Tani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, akademisi, pelaku usaha pariwisata, wisatawan, serta media sosial dan komunitas digital. Ditemukan pula lima pola potensi konflik yang bersumber dari kesenjangan distribusi manfaat, tumpang tindih kepentingan konservasi dan pemanfaatan wisata, ancaman pengambilalihan pengelolaan oleh investor eksternal, perbedaan norma budaya antara wisatawan dan warga, serta konflik internal kelembagaan Pokdarwis. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum koordinasi multipihak dan penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan ekowisata sebagai instrumen mitigasi konflik dan penguatan tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat.*

## PENDAHULUAN

Sektor pariwisata terus menunjukan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu sektor di berbagai negara termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

mencatat bahwa pada bulan Mei 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,31 juta kunjungan, wisatawan nusantra sebesar 97,67 juta, dan wisatawan nasional sebanyak 785,80 ribu (Akbar et al. 2025). Perkembangan pariwisata yang terus meningkat diiringi dengan munculnya berbagai dampak positif dan negatif terhadap kondisi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan masyarakat (Fadilla 2024). Untuk itu, konsep ekowisata mulai dikenalkan untuk mengelola destinasi wisata yang perengelolaannya berpusat pada pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem destiinasi tersebut (Vitasurya et al. 2024). Konsep ekowisata yang semakin relevan sebagai model pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab.

Nusa Tenggara Barat merupakah salah satu wilayah yang saat ini tengah gencar mengembangkan ekowisata. Pengembangan ekowisata salah satunya berada di Desa Wisata Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan daya tarik utama Wisarta Goa Lawah. Wisata Goa Lawah memiiki kedalaman hingga 20 meter dan memiliki 2 pintu masuk yang berjarak 5 meter (Rohana, Susanty, and Bratayasa 2025). Wisata Goa Lawah memadukan keindahan antara gua, sungai dan air. Goa Lawah berasal dari Bahasa Sasak yang berarti Gua Kelelawar yang merujuk pada populasi kelelawar yang tinggal di dalam goa tersebut.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat pada dasarnya melibatkan banyak pihak yang menimbulkan pemikiran yang tidak selalu sejalan. Pemerintah yang lebih berfokus untuk meningkatkan pendapatan daerah asli, badan konservasi yang mementingkan kelestarian ekosistem, pengelola lokal yang bergantung pada keberlanjutan usaha, serta masyarakat yang memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketidaksesuaian kepentingan antaraktor dapat menimnulkan konfik. Konflik ini dapat menghambat keberlanjutan destinasi (Alfiandri, Prasojo, and Salomo 2024). Kondisi ini menunjukan bahwa analisis pemangku kepentingan sangat penting untuk perencanaan ekowisata partisipatif.

Meskipun kajian mengenai potensi Goa Lawah sebagai destinasi ekowisata telah mulai muncul (Rohana et al. 2025). Penelitian yang secara khusus menggambarkan struktur pemangku kepentingan, tingkat pengaruh kepentigan masing-masing aktor. Kemungkinan adanya pola potensi konflik yang terjadi seiringan pengelolaan Goa Lawah yang terus berjalan. Goa Lawah yang berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Nuraksa merupakan salah satu contoh prngelolaan kawasan konservasi yang tumpah tindih dengan pemanfaatan wisata yang berakibat pada konflik antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi wisara. Oleh karena itu, penting untuk mengisi celah ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi aktor-aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata Goa Lawah beserta peran dan kepentingannya; (2) menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing aktor melalui matriks stakeholder; dan (3) mengidentifikasi pola-pola potensi konflik antarpemangku kepentingan serta merumuskan strategi pengelolaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada literatur tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat, sekaligus kontribusi praktis berupa masukan kebijakan bagi Pemerintah Desa Lembah Sempaga, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

## LANDASAN TEORI

### *a. Ekowisata dan Pariwisata Berbasis Masyarakat*

Ekowisata adalah jenis perjalanan wisata ke tempat alami dengan tujuan melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat setempat (Khotimah et al. 2024). Konsep ini memperhatikan empat elemen utama: konservasi budaya atau alam, konservasi,

nilai pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat lokal di setiap fase pengelolaannya. Dengan demikian, pendekatan wisata berbasis komunitas (CBT) menekankan bahwa masyarakat lokal harus menjadi subjek utama dalam perencanaan dan pengelolaan perjalanan, bukan hanya objek penerima manfaat (Bursan et al. 2025) .

Namun, pengelolaan ketika destinasi ekowisata harus mempertimbangkan ekologis sebagai batas mutlak pengembangan ketika lokasi tersebut sebagai batas mutlak pengembangan.di kawasan berstatus konservasi. Studi kebijakan zona inti kawasan konservasi perairan di Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa Kawasan pemanfaatan konservasi untuk ekowisata berkelanjutan memberikan keseimbangan terbaik antara unsur ekologi, ekonomi, dan sosial. Hal ini berbeda dengan skenario pembangunan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan (Muliadi et al. 2022). Hasilnya relevan untuk wilayah Goa Lawah, yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi Taman Hutan Raya, karena menunjukkan bahwa pengembangan wisata harus fokus pada model ekowisata berkelanjutan daripada mengeksploitasi pendapatan jangka pendek.

***b. Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)***

Pemangku kepentingan (stakeholder) didefinisikan sebagai aktor-aktor yang memiliki kepentingan terhadap suatu persoalan bersama, mencakup individu, kelompok, dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan pihak lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut Gray, 1989, dikutip dalam (Bhatta and Joshi 2023) . Merujuk pada Freeman (1984), Sautter dan Leisen 1999, dikutip dalam (Bhatta and Joshi 2023) merumuskan tiga elemen kunci manajemen pemangku kepentingan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi aktor beserta kepentingannya, pengelolaan hubungan antaraktor, serta pengelolaan transaksi dan negosiasi di antara mereka.

Klasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh membantu memetakan posisi strategis masing-masing aktor. Salah satu kerangka yang umum digunakan membedakan stakeholder primer, yaitu pihak dengan kepentingan langsung terhadap sumber daya dan terlibat langsung dalam pemanfaatannya, dengan stakeholder sekunder, yaitu pihak yang memiliki minat namun tidak terlibat langsung dalam eksploitasi sumber daya Wakka, 2014, dikutip dalam (Isa, Indarjo, and Pratikto 2025). Kerangka lain yang lebih rinci dikembangkan oleh Mitchell, Agle, dan Wood 1997, dikutip dalam (Alicyana, Siregar, and Reza 2026) yang mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tiga atribut, yaitu kekuasaan (power), legitimasi (legitimacy), dan urgensi (urgency). Kombinasi ketiga atribut tersebut menghasilkan kategori definitive stakeholder yang memiliki ketiga atribut sekaligus, dominant stakeholder, dependent stakeholder, hingga discretionary stakeholder yang hanya memiliki legitimasi tanpa disertai kekuasaan maupun urgensi yang signifikan.

Dalam konteks pariwisata, kolaborasi antarpemangku kepentingan juga banyak dianalisis melalui model Pentahelix yang melibatkan lima unsur, yaitu akademisi (academic), pelaku usaha (business), komunitas (community), pemerintah (government), dan media (media), yang dikenal dengan akronim ABCGM (Khotimah et al. 2024). Model ini telah diadopsi sebagai strategi resmi dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, dengan asumsi bahwa optimalisasi peran kelima unsur tersebut akan menciptakan pengalaman dan manfaat kepariwisataan yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada tingkat konsep yang lebih luas, kolaborasi antarpemangku kepentingan juga dapat dipahami dari sudut pandang tata kelola kolaboratif. Emerson, Nabatchi, dan Balogh

2011, dikutip dalam (Ulibarri, Siddiki, and Henderson 2023) mendefinisikannya secara instrumental sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor dari berbagai organisasi, tingkat pemerintahan, dan sektor publik-swasta-masyarakat sipil untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Definisi ini berbeda dengan definisi yang lebih struktural dari Ansell dan Gash 2008, dikutip dalam (Ulibarri et al. 2023) Menurut beberapa orang, menggunakan definisi yang lebih luas akan lebih bermanfaat untuk memahami berbagai jenis pekerjaan sama yang terjadi di lapangan termasuk kolaborasi yang belum sepenuhnya formal maupun setara sebagaimana sering ditemukan pada ekowisata berbasis masyarakat di tingkat desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di kawasan ekowisata Goa Lawah, Desa Wisata Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada status kawasan sebagai destinasi ekowisata yang tengah berkembang serta berada dalam kawasan konservasi Taman Hutan Raya Nuraksa, sehingga relevan untuk mengkaji dinamika pemangku kepentingan.

Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan pada kawasan Goa Lawah dan Desa Lembah Sempaga, wawancara semi-terstruktur dengan pengurus Pokdarwis, aparat pemerintah desa, serta perwakilan Kelompok Wanita Tani, dan dokumentasi visual kondisi kawasan. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan desa, publikasi ilmiah terkait ekowisata, serta data kunjungan wisatawan dari platform reservasi daring. Teknik analisis data menggunakan stakeholder analysis dengan tahapan: (1) identifikasi aktor yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan Goa Lawah; (2) klasifikasi peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh masing-masing aktor ke dalam matriks pengaruh-kepentingan; dan (3) analisis pola relasi dan potensi konflik antaraktor berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *A. Identifikasi dan Peran Aktor Pemangku Kepentingan*

Hasil identifikasi menunjukan Sembilan katagore actor utama yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata Goa Lawah, sebagaimana disajikan pada table 1.

**Tabel. 1 Pemetaan Aktor, Peran, Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Utama**

| Aktor | Peran Utama | Tingkat Pengaruh | Kepentingan Utama |
|---|---|---|---|
| Pemerintah Kabupaten (Dinas Pariwisata) | Regulator & fasilitator | Tinggi | PAD, kunjungan wisatawan, citra daerah |
| Pemerintah Desa Lembah Sempaga | Administrator & mediator lokal | Tinggi | Kesejahteraan warga, BUMDes, citra desa |
| Pokdarwis Lembah Sempaga | Pelaksana operasional | Tinggi | Keberlanjutan usaha, pendapatan anggota |
| Masyarakat lokal (termasuk KWT) | Pelaku usaha & penerima dampak | Bervariasi, kolektif tinggi | Pendapatan, lapangan kerja, kelestarian lingkungan |
| BKSDA & Pengelola Tahura Nuraksa | Pengawas konservasi | Tinggi | Kelestarian ekosistem, perlindungan biodiversitas |

| Aktor | Peran Utama | Tingkat Pengaruh | Kepentingan Utama |
|---|---|---|---|
| Akademisi | Peneliti & pendamping teknis | Sedang (berpotensi naik) | Publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat |
| Tour operator / agen perjalanan | Distributor pasar wisatawan | Sedang | Profitabilitas, perluasan pasar |
| Wisatawan | Konsumen akhir | Rendah individual, tinggi kolektif | Pengalaman aman, nyaman, terjangkau |
| Media sosial & komunitas digital | Promotor/reputasi destinasi | Sedang–tinggi | Engagement, konten menarik, followers |

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengaruh formal (Dinas Pariwisata, pemerintah desa, BKSDA) tidak selalu selaras dengan pengaruh operasional (Pokdarwis dan masyarakat), sebagaimana ditemukan pula pada kajian tata kelola kawasan konservasi wisata lainnya. Pokdarwis, meski memegang peran operasional harian yang paling menentukan keberlangsungan kawasan sehari-hari justru berada pada posisi hukum yang lemah karena belum ada peraturan desa yang memberikan mandat formal. Kesenjangan antara pengaruh de facto dan legitimasi de jure inilah yang berpotensi menjadi sumber ketidakpastian kelembagaan dalam jangka panjang.

Pola kesenjangan ini berbeda dengan temuan pada kasus Kampung Ciwaluh, Bogor, di mana Pokdarwis justru telah memperoleh Surat Keputusan dan Surat Operasional resmi dari pemerintah desa sejak tahun 2019, sehingga terklasifikasi sebagai definitive stakeholder yang memiliki atribut kekuasaan, legitimasi, dan urgensi sekaligus (Alicyana et al. 2026). Perbandingan ini menegaskan bahwa penguatan legalitas formal sesederhana penerbitan Surat Keputusan maupun Peraturan Desa merupakan prasyarat mendasar agar peran operasional Pokdarwis Lembah Sempaga yang sudah tinggi dapat dikonversi menjadi kekuatan kelembagaan yang diakui secara hukum.

Dengan menggunakan kerangka primer-sekunder stakeholder Wakka, 2014, dikutip dalam (Isa et al. 2025), Pokdarwis dan masyarakat lokal Lembah Sempaga, termasuk Kelompok Wanita Tani, dianggap sebagai primer pemangku kepentingan karena mereka memiliki hubungan langsung dengan pemanfaatan kawasan Goa Lawah. Sementara itu, sejarawan dan pariwisata dianggap sebagai pemangku kepentingan sekunder, karena mereka memiliki kepentingan tetapi tidak terlibat langsung dalam eksploitasi kawasan Goa Lawah. Pada Ekowisata Rekreasi Pantai Bandengan di Jepara, masyarakat lokal dan komunitas pedagang kaki lima juga direkrut sebagai pemangku kepentingan primer. Dinas Pariwisata Daerah dianggap sebagai pemain kunci, memiliki pengaruh formal yang besar tetapi keterlibatan harian yang lebih sedikit, sementara komunitas pedagang kaki lima juga dianggap sebagai subjek (subyek). Pola ini sejalan dengan pendekatan yang sama untuk memetakan pemangku kepentingan.

Sembilan kategori aktor yang teridentifikasi pada penelitian ini pada dasarnya dapat pula disederhanakan ke dalam kerangka lima unsur Pentahelix (ABCGM), yaitu unsur pemerintah (Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa), komunitas (Pokdarwis dan masyarakat lokal), akademisi, dunia usaha (tour operator), dan media (media sosial serta komunitas digital). Berbeda dengan kasus pengembangan ekowisata tradisi Nyelamaq di Lauq di Lombok Timur, yang menunjukkan bahwa kelima unsur Pentahelix tersebut belum

sepenuhnya bersinergi dan cenderung terbatas pada interaksi antara pemerintah dan komunitas semata (Khotimah et al. 2024). Pengelolaan Goa Lawah justru menunjukkan peran media sosial dan komunitas digital yang relatif menonjol sebagai pendorong utama popularitas destinasi, sekalipun peran tersebut belum diimbangi dengan penguatan kelembagaan yang memadai.

Peran akademisi tergolong unik karena, meski saat ini berpengaruh sedang, posisinya berpotensi meningkat signifikan apabila hasil kajian ilmiah misalnya data baseline populasi kelelawar atau daya dukung ekologis yang hingga kini belum tersedia diadopsi menjadi rujukan kebijakan oleh pemerintah desa maupun Dinas Pariwisata. Hal ini menunjukkan adanya ruang kemitraan riset yang belum dimanfaatkan secara optimal, sebagaimana peran pendampingan akademisi yang telah terbukti efektif meningkatkan kapasitas pengelolaan UMKM dan wisata edukatif pada studi CBT di Pantai Mutun maupun Kampung Ciwaluh (Bursan et al. 2025); (Alicyana et al. 2026).

### *B. Pola Potensi Konflik Antarpemangku Kepentingan*

Analisis relasi antaraktor mengidentifikasi lima pola potensi konflik yang perlu diantisipasi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

**Tabel 2. Pola Potensi Konflik Antarpemangku Kepentingan**

| Pola Konflik | Sumber Ketegangan |
|---|---|
| Pokdarwis vs. masyarakat non-anggota | Kecemburuan distribusi manfaat ekonomi wisata (mis. parkir liar) |
| Dinas Pariwisata vs. BKSDA | Benturan target peningkatan kunjungan dengan prioritas daya dukung ekologis |
| Pokdarwis vs. investor eksternal | Ancaman pengambilalihan pengelolaan oleh modal luar |
| Wisatawan vs. masyarakat lokal | Perbedaan norma budaya dan perilaku pengunjung |
| Internal Pokdarwis | Perselisihan pembagian tugas dan hasil |

Pola konflik yang teridentifikasi mencerminkan tiga sumber ketegangan yang berbeda karakter: ketegangan distribusi ekonomi (konflik 1 dan 5), ketegangan orientasi kebijakan antara pertumbuhan kunjungan dan pembatasan daya dukung (konflik 2), serta ketegangan atas kendali kelembagaan dan norma sosial (konflik 3 dan 4). Ketegangan jenis kedua sejalan dengan temuan analisis skenario kebijakan zona inti kawasan konservasi perairan, bahwa kawasan wisata di dalam area konservasi rentan mengalami trade-off antara target kunjungan dan ambang batas ekologis apabila tidak ada kesepakatan eksplisit mengenai daya dukung maksimal.

Konflik ketiga ancaman pengambilalihan pengelolaan oleh investor eksternal seiring meningkatnya popularitas Goa Lawah di media sosial merupakan risiko yang khas dihadapi destinasi ekowisata berbasis masyarakat pada fase pertumbuhan. Tanpa penguatan legalitas kelembagaan lokal, viralitas digital yang semestinya menjadi peluang promosi berpotensi berbalik menjadi ancaman terhadap prinsip kepemilikan dan kendali komunitas atas sumber dayanya sendiri. Risiko ini sejalan dengan temuan bahwa dinamika politik dan kekuasaan, baik internal maupun eksternal, dapat mendorong terjadinya kooptasi terhadap kelompok masyarakat yang secara kelembagaan masih lemah dalam kolaborasi tata kelola sumber daya bersama.

### *C. Strategi Pengelolaan Pemangku Kepentingan*

Berdasarkan pola konflik yang teridentifikasi, penelitian ini merumuskan empat strategi mitigasi yang bersifat saling melengkapi. Pertama, pembentukan forum koordinasi multipihak yang beranggotakan perwakilan pemerintah desa, Pokdarwis, BKSDA, akademisi, dan tokoh masyarakat, yang bertemu secara berkala untuk membahas perkembangan dan kendala pengelolaan. Kedua, penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Goa Lawah secara partisipatif melalui musyawarah desa, guna memberikan payung hukum yang eksplisit atas hak, kewajiban, dan pembagian manfaat antaraktor termasuk memperkuat posisi hukum Pokdarwis yang selama ini masih lemah. Ketiga, sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai mekanisme keterlibatan dan pembagian manfaat ekowisata, untuk mengurangi kesenjangan persepsi antara anggota dan bukan anggota Pokdarwis. Keempat, penguatan kapasitas Pokdarwis dalam manajemen konflik, negosiasi, dan komunikasi publik, mengingat posisi mereka sebagai aktor operasional yang paling sering berhadapan langsung dengan potensi gesekan di lapangan, baik dengan wisatawan maupun sesama warga.

Rekomendasi pembentukan forum koordinasi multipihak dalam penelitian ini sejalan dengan prinsip pendekatan kolaboratif dalam perencanaan pariwisata, yang menekankan pentingnya menggabungkan beragam perspektif aktor agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif. Penguatan kapasitas komunikasi Pokdarwis yang direkomendasikan dalam penelitian ini juga selaras dengan temuan bahwa keberhasilan kolaborasi multipihak pada ekowisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh peran komunitas lokal sebagai simpul komunikasi utama (communication hub) yang menjembatani kepentingan antaraktor Pentahelix, alih-alih hanya berperan sebagai pengelola teknis semata.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan Community-Based Tourism juga terbukti secara empiris mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata berkelanjutan secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan skor pemahaman peserta pelatihan ekowisata sebesar 27,4 poin. Strategi sosialisasi dan penguatan kapasitas yang diusulkan dalam penelitian ini dapat mengadopsi pendekatan partisipatif serupa, disertai indikator evaluasi pre-test dan post-test, agar dampaknya terhadap masyarakat Lembah Sempaga lebih terukur. Keempat strategi tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang menekankan pentingnya forum bersama dan instrumen hukum formal sebagai prasyarat keberlanjutan pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources), sebagaimana relevan diterapkan pada kawasan ekowisata yang beririsan dengan status konservasi seperti Goa Lawah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi sembilan kategori pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata Goa Lawah, dengan Pokdarwis dan masyarakat lokal memegang pengaruh operasional tinggi namun berlandaskan legitimasi hukum yang masih lemah. Ditemukan lima pola potensi konflik yang bersumber dari kesenjangan distribusi manfaat ekonomi, tumpang tindih kepentingan konservasi-wisata, ancaman investasi eksternal, gesekan norma budaya, serta konflik kelembagaan internal. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekowisata berbasis masyarakat di Goa Lawah sangat bergantung pada penguatan tata kelola kolaboratif, khususnya melalui pembentukan forum koordinasi multipihak dan penyusunan Peraturan Desa yang secara

formal mengatur hak, kewajiban, dan pembagian manfaat antarpemangku kepentingan. Sejalan dengan pandangan bahwa tata kelola kolaboratif bersifat dinamis dan berkembang melalui berbagai tahapan siklus hidup kelembagaan penguatan forum koordinasi dan Peraturan Desa yang direkomendasikan penelitian ini perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan penyesuaian berkala, bukan solusi satu kali yang bersifat final.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat pengaruh dan kepentingan setiap aktor (misalnya melalui skoring matriks power-interest) serta mengkaji efektivitas forum koordinasi multipihak setelah diimplementasikan, guna memperkaya bukti empiris tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

Akbar, Alvin Aulia, Faizah Nadya Camelia, Maria Floreshita Wulan Tari, and Rafifa Nabila. 2025. "Strategi ITDC Dalam Mempertahankan Eksistensi Bukit Merese Sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan." *Jurnal Kajian Pariwisata* 6(1).

Alfiandri, Alfiandri, Eko Prasojo, and Roy Variant Salomo. 2024. "Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata." 1:19–27.

Alicyana, Poppy, Mariana Rista Ananda Siregar, and Muhammad Reza. 2026. "Komunikasi Pentahelix Dan Relasi Stakeholder Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat Berkelanjutan." 9:155–64.

Bhatta, Kishan Datta, and Buddhi Raj Joshi. 2023. "Community Collaboration with Tourism Stakeholders : Issues and Challenges to Promote Sustainable Community Development in Sanctuary Trail ,." 6272(2013):146–54. doi: 10.36348/sjet.2023.v08i06.004.

Bursan, Rinaldi, Dina Safitri, Aida Sari, Driya Wiryawan, and Faila Shofa. 2025. "Penguatan Ekowisata Dan Pemberdayaan Lokal Dalam Rangka Pembentukan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Pantai Mutun, Pesawaran." (September).

Fadilla, Hasana. 2024. "Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapata Daerah Di Indonesia." 2(1):36–43. doi: 10.31080/BENEFIT.

Isa, Maulana Muhammad, Agus Indarjo, and Ibnu Pratikto. 2025. "Strategi Pengembangan Ekowisata Rekreasi Pantai Berbasis Keterlibatan Stakeholder Di Pantai Bandengan , Jepara." 14(2):327–40.

Khotimah, Nurul, Tutik Alawiyah Syakirin, Fadhila Husna Asri, and Erma Rahmawati. 2024. "Model Pentahelix Dalam Pengembangan Ekowisata Kearifan Lokal Tradisi Nyelamaq Di Lauq Desa Tanjung Luar." 7(2):229–42.

Muliadi, Adi, Soeryo Adiwibowo, Donwill Panggabean, Eha Saleha, Rinda Noviyanti, Jan Hotman, Azhari Azhari, Khabib Mustofa, Dramaga Bogor, and Galih Hendro. 2022. "C Extended of Weight Collective Influence Analysis of Approach An Extended Approach Actor of Weight Collective Influence Graph for Detection Influence for Detection Influence Actor b , 3 Martono Approach of Weight for Influence." 1–13.

Rohana, Syifa Alya, Sri Susanty, and I. Wayan Bratayasa. 2025. "PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN DI OBJEK WISATA GOA LAWAH DESA LEBAH SEMPAGE." 5(2):899–908.

Ulibarri, Nicola, Saba Siddiki, and Hayley Henderson. 2023. "Drivers and Dynamics of Collaborative Governance in Environmental Management." 495–504. doi: 10.1007/s00267-022-01769-7.

Vitasurya, V. Reni, Anna Pudianti, L. A. Rudwiarti, Elisabeth Budianto, and Ricky Hartono. 2024. “Penerapan Konsep Ekowisata Dalam Perencanaan Masterplan Desa Ekowisata Pancoh , Sleman , Yogyakarta.” 2(1):136–43.